

**Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam  
(Studi Kasus Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)**

*Poverty in Region Rich in Natural Resources  
(Case Study of Samboja Sub District, Kutai Kartanegara Regency)*

**Efri Novianto, M. Subandi**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fisip-Universitas Kutai Kartanegara  
Jalan Gunung Kombeng No. 27 Tenggarong Kalimantan Timur  
(Hotline/ SMS : 085246667965 / 085250044438)

[efrinovianto@unikarta.ac.id](mailto:efrinovianto@unikarta.ac.id) / [m.subandi@unikarta.ac.id](mailto:m.subandi@unikarta.ac.id)

Naskah diterima 17 Februari 2020, diperbaiki 9 April 2020, disetujui 13 April 2020

**Abstract**

*Samboja District is an area that has a wealth of natural resources in the form of oil and gas. With abundant natural resources, Samboja residents can be more prosperous and free from poverty, but the reality is just the opposite. The purpose of this study is to determine the causes of poverty and its strategies for overcoming it. The approach used was descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The analytical tool used was interactive data analysis. Based on the results of the study it was found that in general the majority of causes of poverty in Samboja District were related to social, cultural and structural factors. Socially, poverty was caused by the socio-economic conditions of families that were in poor condition due to not having a job (unemployment), so they did not have a definite income in sustaining household life. Culturally, poverty in Samboja Subdistrict was caused by cultural factors of the local community related to sanitation, especially the poor in the coastal areas (coast). While structurally, poverty in Samboja Subdistrict was caused by the discrimination against poverty alleviation policies for certain poor families and the available budget allocation was minimal. The poverty reduction strategy that should be carried out by the government of Kutai Kartanegara Regency in the short term is to directly intervene poor households by tackling several poverty indicators, while in the long run it is directed at empowering activities in accordance with the potential of poor families.*

**Keywords; poverty; cause; strategy for overcoming**

**Abstrak**

Kecamatan Samboja merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Seharusnya dengan kekayaan alam yang melimpah, penduduk Samboja dapat lebih sejahtera dan lepas dari jerat kemiskinan, akan tetapi realita yang terjadi justru sebaliknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan dan strategi penanggulangannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data interaktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara umum mayoritas penyebab kemiskinan di Kecamatan Samboja adalah berkaitan dengan faktor sosial, kultural dan struktural. Secara sosial, kemiskinan disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga yang berada dalam kondisi miskin akibat tidak punya pekerjaan (pengangguran), sehingga tidak memiliki pendapatan yang pasti dalam menopang kehidupan rumah tangga. Secara kultural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh faktor budaya masyarakat setempat berkaitan dengan sanitasi khususnya masyarakat miskin di wilayah pesisir (pantai). Sedangkan secara struktural, kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh masih adanya diskriminasi kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada keluarga miskin tertentu dan alokasi anggaran yang tersedia minim. Strategi penanggulangan kemiskinan yang seharusnya dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka pendek yaitu melakukan intervensi langsung kerumah tangga miskin dengan menanggulangi beberapa indikator kemiskinan, sedangkan secara jangka panjang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh keluarga miskin.

**Kata kunci; kemiskinan; penyebab; strategi penanggulangan**

### A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang ada di setiap negara. Tidak ada satupun Negara di dunia yang terbebas dari jerat kemiskinan. Bahkan di Negara maju sekelas Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Australia sekalipun, kemiskinan itu tetap ada walau dengan kadar yang berbeda (Suharto, 2009). Sebagai fenomena sosial, kemiskinan sudah ada sejak awal sejarah manusia, dan berbagai upaya untuk mengatasinya telah banyak dilakukan. Akan tetapi, fenomena tersebut tetap ada dan akan terus ada, hanya mungkin dengan kadar yang berbeda-beda.

Secara teori, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar atau mencapai tingkat kesejahteraan tertentu (Suharto, 2009), (Mafruhah, 2009) dan (Schafner, 2014). Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, mendefinisikan miskin atau kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimal meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 25,949 Juta jiwa atau sekitar 9,82 %. Penduduk miskin terbesar ada di pulau Jawa mencapai 13,340 Juta jiwa sedangkan persentase penduduk miskin terbesar ada di pulau Papua dan Maluku sebesar 21,2 %. Sedangkan Kalimantan memiliki penduduk miskin terendah yaitu sekitar 982,28 ribu jiwa dengan persentase terendah yaitu hanya sekitar 6,09 %.

**Tabel 1.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau di Indonesia Maret 2018

No.	Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	%
1	Sumatera	5.978,80	10,39
2	Jawa	13.340,15	8,94
3	Bali dan Nusa Tenggara	2.051,39	14,02
4	<b>Kalimantan</b>	<b>982,28</b>	<b>6,09</b>
5	Sulawesi	2.063,55	10,64
6	Maluku dan Papua	1.533,64	21,2
<b>Total</b>		<b>25.949,81</b>	<b>9,82</b>

Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia

Di Kalimantan, penduduk miskin terbesar berada di Kalimantan Barat yaitu sebesar 387,08 Ribu jiwa atau 7,77 %. Sedangkan Kalimantan Timur memiliki penduduk miskin sebesar 218,90 Ribu jiwa atau 6,03 %.

**Tabel 2.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Pulau Kalimantan Maret 2018

No.	Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	%
1	Kalimantan Barat	387,08	7,77
2	Kalimantan Tengah	136,93	5,17
3	Kalimantan Selatan	189,03	4,54
4	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>218,90</b>	<b>6,03</b>
5	Kalimantan Utara	50,35	7,09
<b>Total</b>		<b>982,29</b>	<b>6,12</b>

Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia

Kutai Kartanegara sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data BPS tahun 2017, memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu sebesar 55.820 jiwa, jauh di atas dua kota besar di Kalimantan Timur yaitu Samarinda dan Balikpapan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 7,63 %, sedikit di atas rata-rata penduduk miskin di

Kalimantan Timur, tetapi masih lebih sedikit jika dibanding dengan Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.

**Tabel 3.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur 2019

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah (jiwa)	%
1	Samarinda	38.950	4,72
2	<b>Kutai Kartanegara</b>	<b>55.820</b>	<b>7,63</b>
3	Balikpapan	15.550	2,81
4	Kutai Timur	10.170	9,16
5	Kutai Barat	12.650	8,65
6	Mahakam Ulu	2.880	10,65
7	Berau	11.470	5,37
8	Bontang	8.600	5,18
9	Penajam Paser Utara	11.660	7,49
10	Paser	23.170	8,68
	Total	212.920	6,11

Sumber: BPS, Profil Kemiskinan Kaltim 2018

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, penduduk miskin terbesar berada di Kecamatan Samboja dengan jumlah mencapai 17.585 Jiwa, diikuti oleh Kecamatan Muara Kaman sebesar 11.760 Jiwa, Kecamatan Marang Kayu 11.732 Jiwa, Kecamatan Anggana sebesar 10.796 Jiwa dan Kecamatan Muara Badak sebesar 10.230 Jiwa.

**Tabel 4.** Jumlah RTM dan Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

No.	Kecamatan	Jiwa	Rumah Tangga
1	<b>Samboja</b>	<b>17.585</b>	<b>4.861</b>
2	Muara Kaman	11.760	3.170
3	Marang Kayu	11.732	3.096
4	Anggana	10.796	2.761
5	Muara Badak	10.230	2.707
6	Tenggarong	9.124	2.582
7	Sebulu	8.744	2.559
8	Loa Janan	8.723	2.530
9	Loa Kulu	8.600	2.499
10	Kota Bangun	8.333	2.455
11	Tenggarong Seberang	7.830	2.362
12	Muara Jawa	4.644	1.179
13	Kenohan	3.584	995
14	Kembang Janggut	3.310	958
15	Muara Wis	2.705	735
16	Sanga-Sanga	2.327	697
17	Tabang	1.911	662
18	Muara Muntai	1.132	350

Sumber: Basis Data Terpadu 2019

Kecamatan Samboja merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang di dalamnya terdapat beberapa perusahaan nasional dan multinasional. Selain itu, ada beberapa perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, perkebunan sawit, pengelolah limbah dan pembangkit listrik. Seharusnya dengan kekayaan alam melimpah dan banyak perusahaan nasional serta multinasional yang mengeksploitasi sumber daya alam, penduduk Kecamatan Samboja dapat lebih sejahtera dan lepas dari jerat kemiskinan. Akan tetapi, realita yang terjadi justru sebaliknya, daerah yang kaya dengan sumber daya alam ini memiliki penduduk miskin terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Supadiyanto dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa masalah pengangguran dan kemiskinan sulit diatasi oleh pemerintah lebih dikarenakan faktor koordinasi dan sinergi antara birokrasi, perguruan tinggi dan dunia usaha (Supadiyanto, 2013).

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui penyebab dan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan.

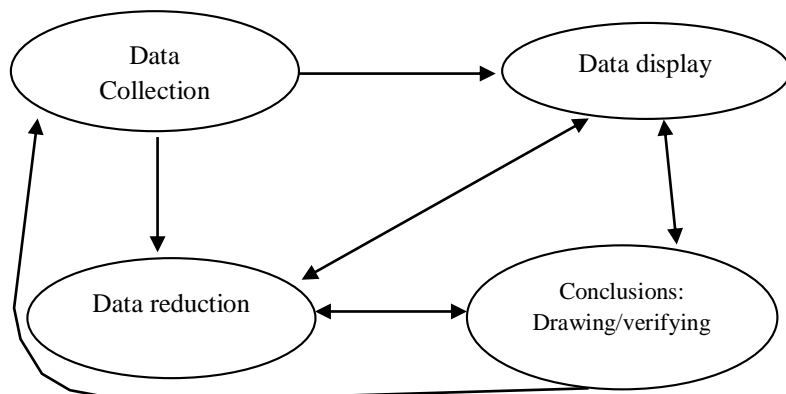
## B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada narasumber penelitian di antaranya TKPKD Kutai Kartanegara, DRD, Camat, Dinsos, Puskesmas dan RTS. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan di antaranya adalah melakukan kajian terhadap data kemiskinan Kutai Kartanegara yang terangkum dalam BDT 2019.

Hasil wawancara mendalam selanjutnya dianalisis bersamaan dengan data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian. Data primer yang didapat dari *in-depth interview* dikelola dengan analisa data kualitatif dengan metode interaktif sebagaimana di kemukakan oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1992).

**Gambar 1.** Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1992)

Pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi data dan sumber data.

### C. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Kutai Kartanegara sesungguhnya telah melakukan penyesuaian terhadap 14 indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dengan kondisi masyarakat, sehingga hanya menyisakan 12 indikator untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin. Ke 12 indikator tersebut dibedakan berdasarkan wilayah yaitu wilayah tengah, wilayah hulu dan wilayah pesisir (pantai) sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.** Pembagian Kecamatan Berdasarkan Pengelompokan Wilayah

No	Wilayah	Kecamatan
1	Tengah	Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman
2	Hulu	Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan,

	Kembang Janggut dan Tabang
3	Pesisir (Pantai) Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Muara Badak dan Marang Kayu

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Adapun 12 indikator tersebut adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> perorang untuk wilayah tengah, sedangkan untuk wilayah hulu dan pantai kurang dari 5 m<sup>2</sup> perorang;
2. Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan untuk wilayah tengah, sedangkan untuk wilayah hulu dan pantai jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu;
3. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain untuk wilayah tengah;
4. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik;
5. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung untuk wilayah tengah, sedangkan untuk wilayah hulu dan pantai sumber air minum berasal dari sungai/danau/ waduk/ air hujan;
6. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600 ribu perbulan;
7. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD/ paket A;
8. Tidak memiliki aset yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500 ribu, seperti sepeda motor, mobil, emas, tabungan, hewan ternak (sapi, kerbau, kuda dan babi), kapal/ perahu motor, AC atau memiliki rumah ditempat lain.
9. Kepala rumah tangga menderita cacat permanent (tuna daksa, netra, rungu, wicara, grahita);
10. Kepala rumah tangga menderita penyakit kronis menahun seperti hipertensi, rematik, asma, jantung, diabetes, TBC, stroke, kanker, tumor ganas, gagal ginjal, dan sejenisnya;

11. Kepala rumah tangga tidak bekerja, atau bekerja kurang dari 12 jam per minggu;
12. Pendapatan perkapita berada di desil 1, 2 dan 3.

Penetapan indikator yang lebih spesifik dan dibedakan berbasis wilayah, dimaksudkan agar rumah tangga miskin yang nantinya masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) lebih akurat, sehingga harapannya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Harus diakui bahwa selama ini banyak rumah tangga miskin penerima manfaat tidak tepat sasaran, karena data yang tidak akurat. Penyebab tidak akuratnya data rumah tangga miskin tersebut, selain penggunaan indikator yang bias wilayah, juga tidak dilibatkannya unsur pemerintahan setempat baik di tingkat desa atau kelurahan dan juga tingkat RT dalam validasi data kemiskinan. Atas dasar itulah kemudian di tingkat desa atau kelurahan dibentuk lembaga pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas). Pembentukan Puskesmas ini merupakan amanah Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Berdasarkan Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tersebut, Puskesmas bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas (termasuk yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
2. Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di tingkat desa/kelurahan;
3. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat kabupaten;
4. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas;
5. Memberikan rujukan atas keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/ layanan sosial di desa/ kelurahan atau kabupaten melalui SLRT;
6. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non-pemerintah termasuk pihak swasta (CSR/TJSP) di desa/ kelurahan.

Selain membantu pemerintah dalam hal pendataan, verifikasi, validasi rumah tangga miskin, adanya Puskesmas ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal mengakses layanan sosial bagi warga miskin. Hasil pendataan, verifikasi dan validasi rumah tangga miskin yang dilakukan oleh Puskesmas, selanjutnya dibahas bersama dalam musyawarah desa atau kelurahan untuk disepakati dan disahkan sebagai data penduduk miskin di wilayahnya, untuk selanjutnya dimasukkan dalam basis data terpadu (BDT). BDT merupakan gabungan data dari berbagai sumber di antaranya dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, Program Raskin, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program JKN, Kartu Perlindungan Sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011-2014. Pemerintah daerah secara berjenjang melakukan pemutakhiran data BDT tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan data BDT 2019, penduduk miskin di Kecamatan Samboja berjumlah 17.585 jiwa atau 4.861 rumah tangga. Adapun rincian penduduk miskin di Kecamatan Samboja dapat diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 6.** Sebaran Rumah Tangga dan Penduduk Miskin di Kecamatan Samboja

No	Kelurahan/ Desa	Jiwa	Rumah tangga
1	Bukit Merdeka	1780	496
2	Karya Merdeka	1751	491
3	Sungai Merdeka	1572	453
4	Samboja Kuala	1336	298
5	Sanipah	1119	291
6	Desa Tani Bakti	1051	236
7	Ambarawang Laut	815	227
8	Muara Sembilang	805	209
9	Salok Api Laut	751	200
10	Desa Bukit Raya	692	192
11	Ambarawang Darat	682	188
12	Teluk Pemedas	636	183
13	Margomulyo	597	181
14	Sungai Seluang	575	161
15	Handil Baru	506	154
16	Wonotirto	500	148
17	Salok Api Darat	463	142
18	Desa Beringin Agung	463	130
19	Desa Karya Jaya	388	128
20	Tanjung Harapan	383	120
21	Handil Baru Darat	295	103
22	Kampung Lama	266	76
23	Argosari	159	54
<b>Total</b>		<b>17.585</b>	<b>4.861</b>

Sumber: Basis Data Terpadu 2019

Rumah tangga miskin dan warga miskin terbesar di Kecamatan Samboja berada di Kelurahan Bukit Merdeka sebanyak 1780 jiwa atau 496 rumah tangga, diikuti oleh Kelurahan Karya Merdeka sebanyak 1751 jiwa atau 491 rumah tangga, Kelurahan Sungai Merdeka sebanyak 1572 jiwa atau 453 rumah tangga dan di Kelurahan Samboja Kuala sebanyak 1336 jiwa atau 293 rumah tangga. Sedangkan penduduk miskin di Kelurahan Sanipah sebanyak 1119 jiwa atau 291 rumah tangga dan Desa Tani Bakti sebanyak 1051 jiwa atau 236 rumah tangga.

Kelurahan Bukit Merdeka, Karya Merdeka dan Sungai Merdeka berada di wilayah daratan dan pegunungan, meliputi wilayah taman hutan raya (tahura) Bukit Soeharto, Bukit Bengkirai, dan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sedangkan Kelurahan Samboja Kuala dan Sanipah berada di wilayah pesisir (pantai).

Kemiskinan dilihat dari indikator kondisi fisik perumahan, mayoritas rumah tangga miskin hanya berlantaikan tanah, bambu atau kayu dengan kualitas rendah sebanyak 421 unit rumah. Kondisi atap daun nipah atau seng kualitas rendah sebanyak 385 unit dan rumah dengan dinding terbuat dari bambu atau kayu kualitas rendah sebanyak 335 unit. Sedangkan penduduk miskin dengan kondisi rumah terparah yang meliputi atap, lantai dan dinding (Aladin) terbuat dari bahan yang berkualitas rendah sebanyak 188 unit rumah.

**Tabel 7.** Kondisi Fisik Perumahan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Samboja

No	Kondisi Perumahan	Rumah Tangga
1	Atap	385
2	Lantai	421
3	Dinding	335
4	Aladin	188
5	Air Bersih	196
6	Listrik	47
7	Jamban	21
8	ALiJam	1

Sumber: Basis Data Terpadu 2019

Rumah tangga miskin yang belum memiliki sumber air bersih sebanyak 196 unit rumah, belum memiliki fasilitas listrik PLN sebanyak 47 unit rumah dan belum memiliki fasilitas sanitasi (jamban) sebanyak 21 unit rumah.

Jika kemiskinan dilihat dari indikator pendidikan rumah tangga miskin, 77 jiwa penduduk miskin merupakan buta aksara (tidak bisa baca tulis) dan anak putus sekolah sebanyak 254 orang. Sedangkan kemiskinan dilihat dari indikator ketenagakerjaan, kepala rumah tangga yang tidak bekerja sebanyak 298 orang, dan angkatan kerja yang tidak bekerja sebanyak 1031 orang.

**Tabel 8.** Kondisi Pendidikan dan Ketenagakerjaan Rumah Tangga Miskin Kecamatan Samboja

No	Kondisi Pendidikan dan Ketenagakerjaan	Jiwa
1	Buta Aksara	77
2	Putus Sekolah	254
3	Kepala Rumah Tangga Tidak Bekerja	298
4	Angkatan Kerja Tidak Bekerja	1031

Sumber: Basis Data Terpadu 2019

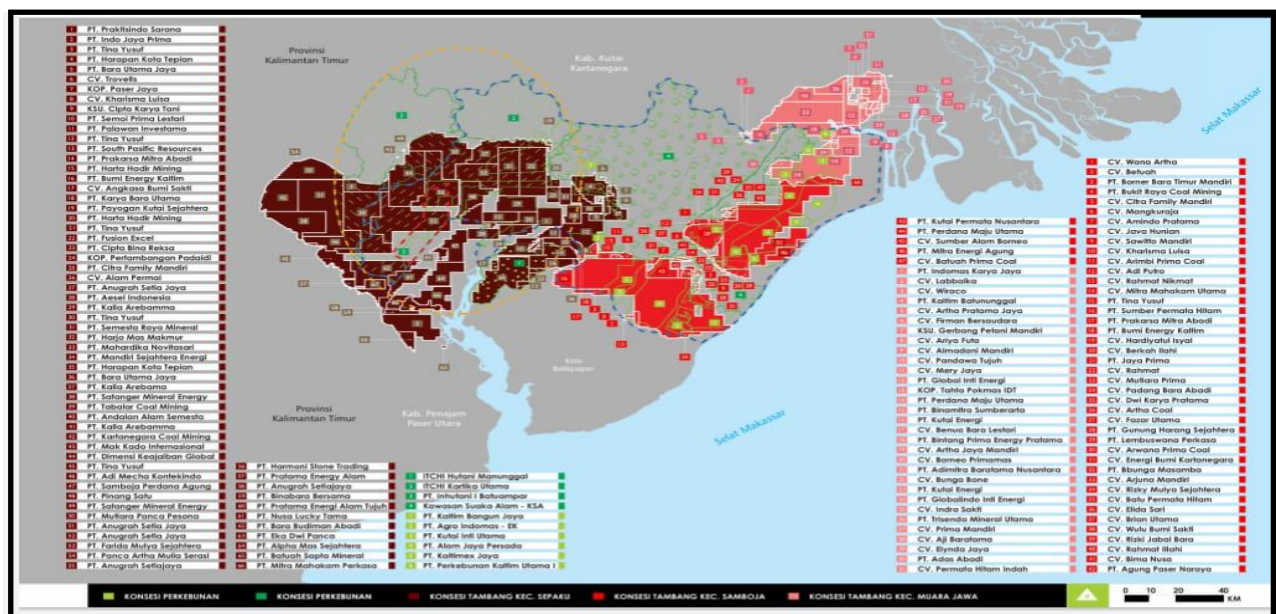
Secara umum mayoritas penyebab kemiskinan di Kecamatan Samboja adalah berkaitan dengan faktor sosial, kultural dan struktural. Sedangkan faktor individual yang berkaitan dan kondisi fisik dan psikologis (*disabilitas*), tidak begitu signifikan. Faktor sosial berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin akibat tidak punya pekerjaan (pengangguran), sehingga tidak memiliki pendapatan yang pasti dalam menopang kehidupan rumah tangga.

Hal itu sejalan dengan data BDT 2019, ditemukan kepala rumah tangga tidak bekerja sebanyak 298 orang dan angkatan kerja tidak bekerja sebanyak 1031 orang. Jika di persetase, angka kemiskinan yang disebabkan oleh faktor tidak bekerja (pengangguran) mencapai 7,56 %. Sedangkan kepala rumah tangga yang tidak bekerja sebesar 6,13 % dari jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Samboja.

Secara kultural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh faktor budaya masyarakat setempat berkaitan dengan sanitasi khususnya masyarakat miskin di wilayah pesisir (pantai). Sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai Samboja tidak memiliki jamban pribadi atau menggunakan jamban bersama-sama dengan orang lain.

Secara struktural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh masih adanya diskriminasi kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada keluarga miskin tertentu.

**Gambar 2.** Sebaran Konsesi Perkebunan dan Pertambangan di Samboja



Sumber: Jaringan Tambang Kaltim 2019

Misalnya untuk mengakses program bedah rumah, keluarga miskin selain harus memenuhi indikator fisik rumah di antaranya luas bangunan dan bahan yang digunakan untuk atap, lantai dan dinding, juga diharuskan memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang ditempati baik berupa sertifikat, PPAT atau surat keterangan hak atas tanah lainnya. Kebijakan tersebut sangat diskriminatif, karena sebagian keluarga miskin sesungguhnya berada di wilayah kawasan hutan raya (Tahura Bukit Soeharto) khususnya masyarakat yang berada di Kelurahan Bukit Merdeka, Karya Merdeka dan Sungai Merdeka. Selain itu juga terdapat rumah tangga miskin yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan kawasan BP Migas dengan status lahan pinjam pakai khususnya yang berada di Desa Tani Bakti dan Kelurahan Sanipah. Sementara, program bedah rumah yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui festival bedah rumah mewajibkan status kepemilikan lahan rumah yang akan dibedah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun beberapa strategi penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan dalam program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bersifat intervensi langsung ke rumah tangga miskin sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Intervensi tersebut hanya merupakan obat sesaat, dan tidak akan mampu mengatasi kemiskinan secara keseluruhan karena sifatnya yang jangka pendek (sementara). Perumpamaan program tersebut adalah pemberian ikan atau obat penenang, sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara keseluruhan dalam jangka panjang.

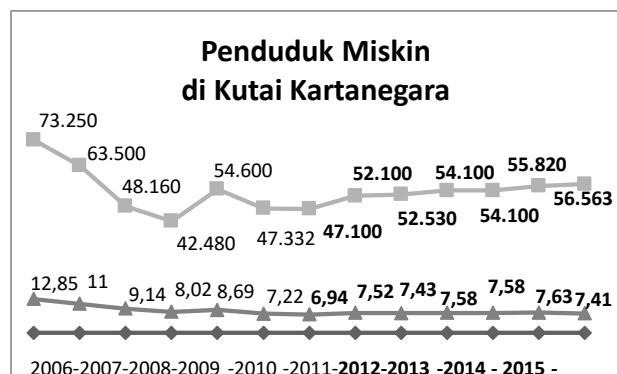
Program intervensi langsung ke rumah tangga miskin tersebut berupa bedah rumah. Program tersebut dijalankan dengan merujuk pada indikator fisik bangunan rumah tangga miskin, meliputi jenis atap, lantai dan dinding. Jika jenis atap rumah tersebut terbuat dari

daun nipah atau seng kualitas rendah akan dilakukan perbaikan atap dengan seng yang berkualitas. Jika lantai atau dinding rumah terbuat dari tanah atau bambu, program atau kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki jenis lantai atau dinding rumah menjadi semen atau kayu berkualitas, sehingga indikator kemiskinan berdasarkan fisik bangunan dapat ditanggulangi. Pemerintah daerah, pemerintah desa (DD/ADD) dan perusahaan sekitar dapat dilibatkan dalam program bedah rumah. Untuk itu, diperlukan sinergitas berupa sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan perusahaan. Di Kecamatan Samboja terdapat 1.329 unit rumah yang layak untuk mendapatkan program bedah rumah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 telah mengalokasikan anggaran untuk program bedah rumah sebanyak 2.480 unit, sedangkan melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 2.320 unit. Total rumah yang berhasil di bedah sebanyak 4.800 unit di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Rata-rata alokasi anggaran yang disediakan untuk program bedah rumah mencapai 42,5 Juta/rumah, sehingga total anggaran yang telah dialokasikan untuk program bedah rumah mencapai 204 Milyar rupiah. Dengan alokasi anggaran sebesar 204 Milyar rupiah tersebut, idealnya sejak tahun 2015 telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 4.800 rumah tangga miskin, tetapi realita yang terjadi jumlah penduduk miskin cenderung bertambah, meskipun dengan persentase yang stabil diangka 7 %.



**Gambar 3.** Trend Penduduk Miskin Kutai Kartanegara tahun 2006 sampai dengan 2018



Sumber: diolah dari data BPS

Program bedah rumah yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2012 hingga saat ini sangat populis karena menyentuh langsung ke indikator kemiskinan (fisik bangunan rumah tangga miskin), program tersebut sangat pragmatis sehingga gagal mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar berada di Kecamatan Samboja. Selain itu, program bedah rumah hanya memperhatikan aspek fisik dari rumah. Sedangkan aspek sosial dan psikologis dari fungsi rumah belum tercapai.

Pada tahun 2019 program bedah rumah ini kembali dilanjutkan dengan melibatkan pemerintah desa melalui alokasi dana desa (ADD) dan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) untuk ikut membantu memperbaiki fisik rumah milik keluarga miskin. Total rumah penerima program pada tahun 2019 di Kecamatan Samboja sebanyak 100 rumah masing-masing 50 rumah di Desa Argosari dan 50 rumah di Kelurahan Tanjung Harapan.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang diindikasikan dengan pendidikan kepala keluarga minimal SLTA/ Sederajat, program yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Samboja adalah menyelenggarakan program kelompok belajar (Kejar) Paket A, B dan C. Program tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi salah satu indikator kemiskinan yang dicirikan oleh

tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Selain itu, program kejar paket A, B dan C dimaksudkan untuk mengentas buta aksara dan mengatasi anak putus sekolah. Di Kecamatan Samboja kepala rumah tangga berstatus buta aksara mencapai 77 orang, sedangkan anak putus sekolah mencapai 254 orang. Hadirnya program ini diharapkan dapat mencegah munculnya kemiskinan warisan akibat ketiadaan pendidikan yang layak bagi keluarga miskin.

Untuk mengatasi rumah tangga miskin yang dicirikan dengan tidak memiliki fasilitas buang air besar, pemerintah dapat membuat program pembuatan sanitasi melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pemerintah juga dapat melibatkan perusahaan dalam hal pembuatan sanitasi tersebut melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau swadaya masyarakat sekitar melalui program arisan jamban/ toilet. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Rumah tangga miskin yang dicirikan tidak memiliki fasilitas buang air besar/ sanitasi tersebut mencapai 21 unit. Penduduk yang bermukim di wilayah pesisir pantai, sebagian tidak memiliki fasilitas buang air besar/ sanitasi dan sebagian lagi menggunakan fasilitas buang air besar bersama. Hanya saja berdasarkan indikator lokal, menggunakan fasilitas buang air besar bersama khusus kecamatan di wilayah pesisir termasuk Samboja tidak digolongkan sebagai keluarga miskin.

Adapun rumah tangga miskin yang dicirikan dari sumber penerangan tidak menggunakan listrik dan sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung maka perlu dilakukan koordinasi dengan penyedia layanan dalam hal ini PLN dan PDAM. Apakah persoalannya karena tidak adanya jaringan listrik PLN atau air PDAM, atau karena ketidakmampuan rumah tangga

miskin dalam mengakses listrik dan air. Jika persoalan disebabkan karena jaringan, pemerintah dapat meminta dan/atau memerintahkan kedua perusahaan tersebut untuk membantu pembuatan jaringan. Sedangkan persoalan yang disebabkan ketidakmampuan rumah tangga miskin dalam mengakses layanan maka pemerintah dapat membuat program pembuatan sambungan PLN atau PDAM murah/ gratis bagi rumah tangga miskin. Perusahaan sekitar dan pemerintah desa dapat dilibatkan dalam kegiatan pembuatan sumur bor atau bantuan terkait lainnya. Di Kecamatan Samboja rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas sumber air bersih mencapai 196 unit rumah dan sumber penerangan dari PLN mencapai 47 unit rumah.

Selanjutnya rumah tangga miskin dicirikan dengan tidak memiliki aset yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500 ribu. Aset tersebut misalnya berupa hewan ternak sapi, kerbau, kuda dan babi. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan mengeluarkan program bantuan ternak melalui Dinas Peternakan. Program bantuan ternak ini dapat diibaratkan seperti memberi kail dan bersifat jangka panjang apabila diikuti dengan program pemberdayaan masyarakat penerima manfaat yaitu bagaimana agar hewan ternak tersebut dapat berkembang biak.

Rumah tangga miskin yang dicirikan dari sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha atau buruh tani, pemerintah dan DPRD telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara. Melalui perda tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan izin pemanfaatan atau pembukaan tanah negara kepada masyarakat dengan luas maksimal 3 ha dengan waktu pengelolaan maksimal 5 tahun. Program ini dapat disinergikan dengan program revolusi jagung yang sedang digalakan oleh pemerintah daerah. Melalui program Revolusi Jagung dan peminjaman tanah negara kepada masyarakat miskin

tersebut, maka akan mengatasi 2 indikator sekaligus yaitu terkait dengan indikator luas lahan kurang dari 0,5 ha, juga indikator ke 11 yaitu kepala rumah tangga tidak bekerja, atau bekerja kurang dari 12 jam per minggu. Melalui perda tersebut diharapkan agar lahan ekstambang yang telah dikembalikan ke negara dapat didistribusikan kepada keluarga miskin untuk diolah menjadi lahan perkebunan dan peternakan. Hanya saja permasalahannya, tidak jelasnya status lahan dan banyak lahan ekstambang yang belum dikembalikan ke negara, yang berakibat perda IMTN ini tidak dapat dilaksanakan.

Jika keenam indikator rumah tangga miskin ini berhasil diintervensi oleh pemerintah melalui serangkaian program berkelanjutan, diprediksi akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Samboja secara signifikan. Program yang bersifat intervensi langsung ini harus dilakukan secara tepat, kepada rumah tangga miskin dengan memperhatikan variabel yang paling dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tentu program ini memiliki beberapa kelemahan di antaranya bersifat jangka pendek (sementara) dan tentunya berbiaya mahal. Salah satunya adalah program bedah rumah yang telah menghabiskan anggaran mencapai 204 Milyar rupiah. Jika seluruh rumah tangga miskin yang dicirikan oleh fisik rumah di Kecamatan Samboja akan diberikan program bedah rumah (1.329 unit), maka memerlukan anggaran mencapai 56 Milyar rupiah.

Selain itu, program yang sifatnya bantuan langsung biasanya akan berdampak pada *moral hazard*, yang akan memunculkan sikap masyarakat yang mengaku miskin hanya karena ingin mendapatkan program tersebut (Novianto, 2012). *Moral hazard* lainnya adalah sikap ketergantungan yang tinggi terhadap uluran tangan pemerintah. Untuk itu peran Puskesmas bersama dengan RT, desa dan kelurahan sebagai ujung tombak verifikasi dan validasi rumah tangga miskin sangat diperlukan.

Pemerintah perlu meningkatkan peran lembaga keagamaan semacam BAZ/ LAZ, dan rumah ibadah (Mesjid dan Gereja) dalam hal memberikan penyadaran terkait dengan *moral hazard* tersebut serta memberikan motivasi kepada keluarga miskin (psikologis) untuk keluar dari jurang kemiskinan. Kondisi warga miskin selain dihadapkan pada tekanan ekonomi, juga dihadapkan pada tekanan psikologis, yang ditandai dengan rasa malu (*minder*), ketakutan dan ketidakpercayaan diri. Oleh karena itu, labelisasi rumah tangga miskin dengan memberikan stiker pada rumah tangga miskin penerima manfaat, sangat tidak tepat dan justru makin memberikan tekanan psikologis bagi keluarga miskin. Pelibatan lembaga keagamaan dan rumah ibadah, diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor individual khususnya yang berkaitan dengan rasa malas dan ketidakpercayaan diri bahwa mereka mampu keluar dari jurang kemiskinan.

Program jangka panjang penanggulangan kemiskinan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika program jangka pendek lebih pada program intervensi langsung kerumah tangga miskin sesuai dengan indikator yang dimiliki, maka program pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan agar masyarakat miskin lebih berdaya dan dalam jangka panjang dapat lepas dari kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tentunya harus mempertimbangkan potensi wilayah dan potensi yang dimiliki oleh orang miskin, tingkat kemiskinan serta penyebab kemiskinan itu sendiri. Artinya program pemberdayaan yang nantinya dilakukan, tidak harus sama antar wilayah atau disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Jika wilayah tersebut adalah wilayah perairan atau pantai, program pemberdayaan diarahkan untuk memanfaatkan potensi perairan atau pantai tersebut, misalnya berkaitan dengan pengelolaan hasil tangkapan (ikan) dan wisata bahari.

Program pemberdayaan masyarakat juga harus melihat apa yang dimiliki oleh orang miskin (potensi) bukan pada apa yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Jika keahlian orang miskin tersebut adalah bertani dan berkebun, maka program pemberdayaan tersebut diarahkan pada bidang pertanian dan perkebunan. Program tersebut dapat disinergikan dengan program revolusi jagung dengan memanfaatkan tanah negara melalui redistribusi lahan. Lahan-lahan ekstambang yang telah dikembalikan ke negara, dapat dimanfaatkan untuk mendukung program revolusi jagung dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini sejalan dengan penelitian Sumarto dan Suryahadi dimana disimpulkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia (PSEKP, 2018).

Masyarakat dengan kategori sangat miskin yang disebabkan oleh faktor ketidakmampuan dalam meningkatkan pendapatan karena lanjut usia, cacat permanen atau menderita penyakit kronis seperti indikator kemiskinan nomor 9 dan 10 maka program yang tepat adalah pemberian bantuan perlindungan sosial. Sedangkan untuk kategori miskin dan hampir miskin yang disebabkan bukan oleh ketidakmampuan dalam meningkatkan pendapatan karena lanjut usia, cacat permanen atau menderita penyakit kronis maka dapat dilakukan kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan atau pembuatan usaha mikro.

Program pemberdayaan juga harus diikuti dengan pembukaan akses ke lapangan kerja dan adanya jaminan dalam keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil berupa bantuan permodalan dan pemasaran. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta dinas terkait lainnya sangat diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai lembaga yang mengkoordinir OPD dalam penanggulangan

kemiskinan harus di optimalkan. Selama ini peran TKPKD, sebagai tempat koordinasi program penanggulangan kemiskinan di Kutai Kartanegara tidak berjalan dengan baik, sehingga program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan tanpa koordinasi antar OPD terkait. Temuan ini sama dengan hasil penelitian Zaini yang menyatakan bahwa TKPK belum menjalankan fungsinya dengan baik (Zaini, 2010).

Perusahaan sekitar dapat juga dilibatkan dalam program tersebut dalam bentuk penyediaan akses lapangan kerja atau pemberdayaan usaha mikro kecil tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Demikian juga pemerintah Desa dapat dilibatkan dengan mengalokasikan kegiatan dan anggaran dalam bentuk padat karya tunai (Permen PDT Nomor 16 Tahun 2018), bantuan bagi usaha kecil mikro dan pelatihan/ pemberdayaan masyarakat miskin.

Selain program pemberdayaan, juga diperlukan program yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan anak-anak penduduk miskin melalui pendidikan gratis atau bea siswa khusus. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah keberlanjutan kemiskinan karena warisan. *Leading sektor* ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya dengan melibatkan perusahaan, pemerintah desa dan Badan Amil Zakat (BAZ/LAZ).

Keunggulan dari program yang bersifat pemberdayaan adalah berbiaya murah, bersifat mendidik dan menumbuhkan kemandirian masyarakat. Sedangkan kelemahan dari program yang bersifat pemberdayaan adalah terkadang tingkat keberhasilan program tersebut tidak dapat terukur secara kuantitatif. Selain itu juga, karena sifatnya yang jangka panjang, keberhasilan program pemberdayaan tersebut tidak dapat dilihat dengan segera.

Faktor kunci dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah

komitmen dan dukungan Kepala Daerah, Perusahaan dan Pemerintah Desa. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran minimal 10 % dari APBD/APBDesa, sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, validasi dan akurasi data kemiskinan sebagai basis penyusunan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pelibatan lembaga keagamaan semacam Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mutlak dilakukan. Selain dilibatkan dalam bentuk program atau kegiatan, juga dalam hal pemberian pemahaman keagamaan yang ditujukan untuk mengatasi *moral hazard* masyarakat sebagai efek ikutan dari adanya program bantuan untuk masyarakat miskin tersebut dan memberikan motivasi kepada masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan, karena pada dasarnya penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

#### **D. Penutup**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Secara umum mayoritas penyebab kemiskinan di Kecamatan Samboja adalah berkaitan dengan faktor sosial, kultural dan struktural. Sedangkan faktor individual yang berkaitan dan kondisi fisik dan psikologis (disabilitas), tidak begitu signifikan. Faktor sosial berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin akibat tidak punya pekerjaan (pengangguran), sehingga tidak memiliki pendapatan yang pasti dalam menopang kehidupan rumah tangga.

Secara kultural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh faktor budaya masyarakat setempat berkaitan dengan sanitasi khususnya masyarakat miskin di wilayah pesisir (pantai). Mayoritas masyarakat di pesisir pantai Samboja tidak memiliki jamban pribadi atau menggunakan jamban bersama-sama dengan orang lain.

Secara struktural kemiskinan di Kecamatan Samboja disebabkan oleh masih adanya diskriminasi kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada keluarga miskin tertentu. Misalnya untuk mengakses program bedah rumah, keluarga miskin selain harus memenuhi indikator fisik rumah di antaranya luas bangunan dan bahan yang digunakan untuk atap, lantai dan dinding, juga diharuskan memiliki sertifikat hak milik. Kebijakan tersebut diskriminatif, karena sebagian keluarga miskin berada di wilayah kawasan hutan raya (Tahura Bukit Soeharto) khususnya yang berada di Kelurahan Bukit Merdeka, Karya Merdeka dan Sungai Merdeka. Selain itu, terdapat rumah tangga miskin yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan kawasan BP Migas dengan status pinjam pakai khususnya yang berada di Desa Tani Bakti dan Kelurahan Sanipah.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah ada yang bersifat jangka pendek yaitu intervensi langsung kerumah tangga miskin dengan menutupi indikator kemiskinan melalui program bedah rumah, kejar paket A, B dan C, bantuan fasilitas sanitasi, air bersih dan sumber penerangan PLN. Sedangkan program jangka panjang diarahkan pada program yang bersifat pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh keluarga miskin.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disarankan beberapa hal yaitu agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun dokumen *Grand Desain* dan *Road Map* Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya pemerintah daerah harus mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sikronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan

pada basis data terpadu (BDT). Pemerintah juga perlu melibatkan perusahaan baik swasta maupun pemerintah, perguruan tinggi, BAZ/LAZ, rumah ibadah dan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan di daerah.

### Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dibiayai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui program penelitian desentralisasi.

### Pustaka Acuan

- Mafruhah, I. (2009). *Multidimensi Kemiskinan*. Surakarta: UNS Press.
- Miles, M., & Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Novianto, E. (2012). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (studi pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 2*, 180-205.
- PSEKP, U. (2018). *Laporan Roadmap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara*. Tenggarong: Bappeda Kukar.
- Schafner, J. (2014). *Development economics: theory, empirical research, and policy analysis*. John Wiley & Sons, Inc.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Supadiyanto. (2013). Sinergi Perguruan Tinggi-Birokrasi-Korporasi (Segitiga Besi Kewirausahaan) untuk Memberdayakan Penduduk Miskin & Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12 No. 1 hal. 106-116.
- Zaini, A. (2010). Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam, Sebuah Paradoks Pembangunan. *Jurnal Borneo Administrator Vol 6 No 1*, 1-19.